

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Muktie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konpress dan Citra Media, Jakarta, 2006
- Adam Podigorecki dan Cristopher J Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Agus Haryadi dkk, Bikameral Bukan Federal, Kelompok DPD di MPR-RI, 2006.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001
- Ahmad (A.) Rosyid Al Atok; Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara BIKameal; Setara Press, Malang 2015.
- Astim Riyanto; Teori Konstitusi; Yapemdo; Bandung; 2006.
- A.V. Dicey, "Introduction to Study of the Law of the Constitution", London; Macmillan Education LTD, 1959.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta, UI Press, 1995.
- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta Indonesia Hill, 1992.
- Bambang Sunggono; Metodologi Penelitian Hukum; Rajawali Press; Jakarta 1996.
- B.N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan cara Kerjanya 1945-2004, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, 1992.
- Dedy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Tata Negara : Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republic Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Deny Indrayana, Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran, Penerbit Mizan, Jakarta, 2007.
- Efriza & Syafuan Rozi, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD: Menembus Lorong Waktu Doloe, Kini, dan Esok, Alfabeta, Bandung, 2010
- Egon G Guba dan Y. Vonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister UNDIP, Semarang, 2015.
- Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.
- George H Sabine, *A History of Political Theory, Third Edition (New York, Chicago, 1961,*
- Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, Newe York University Press..*
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russel & Russe, New York, 1961.
- Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- Haris Jauhari. M. Fajrul falaakh, dkk, Jalan berliku Amandemen Komprehensif, Kelompok DPD di MPR-RI, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie; Menuju Negara Hukum Yang Demokratis; BIP Kelompok Penerbit Gramedia, Jakarta, 2009.
- ; Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi; Sinar Grafika; Jakarta 2010.
- ; Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara; Konstitusi Press (Konpress); Jakarta; 2005.

- ; Konstitusi dan Konsstutualisme; Konstitusi Press (Konpress); Jakarta; 2005.
- ; Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara; Rajawali Press; Jakarta, 2009.
- , Perihal Undang-Undang, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2014.
- , Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jimly Assiddiqie dan Ahmad Sahrial, Peradilan Konstitusi di 10 Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Joel Arthur Barker, *Paradigma*, Terjemahan Moh. Anwar, Batam: Interaksara, 1999
- J. Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- John Locke, *Two Treaties of Civil Government*, J.M. Dent and Sons Ltd. London, 1960.
- Khelda Ayunita, Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial, Edisi Pertama, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda (editor), Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi, FH.UII Press, Yogyakarta, 2016.
- M. Tahir Azhary; Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini; Prenada Media: Jakarta; 2003.
- M Daud Ali, M Thahir Azhary, dan Habibah Daud, Islam Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1988.
- O.Hood Philips & Jackson, *Constitutional Law and Administrative Law*, Eight Editions, London, Sweet and Maxwel, 2001.
- Reni Dwi Purnomowati; Implementasi Sistem Bikameral dalam parlemen Indonesia; Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2005.
- Roger Cotterell, Sosiologi Hukum, Terjemahan dari Buku asli *The Sociology of Law: An Introduction*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Rony Hanitijo Soemitro; Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sacipto Rahrdjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi : menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Saldi Isra; Hak Veto Untuk DPD : Bikamreal Bukan Federal; Kelompok DPD RI di MPR-RI, Jakarta; 2006.
- Sarja, Negara Hukum Teori dan Praktek, Thafamedia, Yogyakarta, 2016.
- Soeryono Soekanto; Pengantar Penelitian Hukum; Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS); Cetakan Ketiga; Jakarta; 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
- Soetandyo W, Hukum:Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, BP Undip, Semarang, 2013.
- Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983.

- Sulistiyowati Irianto & Sidharta Ed., Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, JHMP-FHUI dan Pustaka Obor, Jakarta, 2017.
- Suteki, Masa depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Trubus Rahardiansyah, Sistem Pemerintahan Indonesia Teori dan Praktek dalam Perspektif Politik dan Hukum, Penerbit Tri Sakti, Jakarta, 2010.
- Valina Singka Subekti; Menyusun Konstitusi Transisi : Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945; Rajawali Press; Jakarta; 2007.
- Widayati, Rekontruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Wirjono Projodikoro, Asas-asas ilmu Negara dan Politik, Eresco, Bandung, 1971.
- , Panduan Pemasarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR-RI, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015.
- , Tafsir Konstitusional Kewenangan Legislasi DPD_RI, Pusat Perancangan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPD-RI, Jakarta, 2015.
- , Kodifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penguatan Kelembagaan DPD-RI, Tim Litigasi DPD-RI, Jakarta, 2015.
- , Analisa dan Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2015, Pusat perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum DPD-RI, Jakarta, 2015.
- , Pergulatan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pusat Perancangan dan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah DPDRI, Jakarta, 2015.
- , Melihat Indonesia dari Daerah; Dari Konsepsi Sampai Implementasi, Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi DPD RI, Jakarta, 2012.

B. JURNAL

- Abdurahman Satrio, Penafsiran Konstitusi oleh MPR Dalam Amandemen UUD 1945 : Pentingnya Menemukan Pembatasan Dalam Amandemen Undang_undang Dasar 1945, Jurnal Majelis, Edisi 03, tahun 2016.
- Abdul Kholik, Deddy Ismatullah & Widayati, The Authority Dispute Of State Institutions in the Implementation of Bicameral System in Indonesia; International Jurnal of Political Science, Law and International Relations, IJPSLIR, Vol 7, Issue 4, Augustus 2017.
- Ahmad Farhan Hamid, DPD RI dan Masa depan Demokrasi Indonesia, Jurnal Ketatanegaraan, Volume003/Juni 2017.
- Dedy Ismatullah, "Cheks and Balances" Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, Jurnal Civility Forum Indonesia Satu, Vol 1, Nomor 1, Juli September 2001.
- Dian Agung Wicaksono, Peluang Judicial Preview Dalam Perbaikan Legislasi Nasional untuk Mewujudkan Konsistensi Konsepsi Negara Hukum di Indonesia, Jentera, Edisi 23, Tahun XIII, Januari –April 2015.
- Fernando Manulang, Negara Pancasila Refleksi Kritis Atas Gagasan Negara Hukum Padmo Wahyono, Jentera, Edisi 15, Tahun IV, Januari – Maret 2007.
- Grogorius Seto Harianto, Dewan Perwakilan Daerah Sesuai UUD NRI Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan, Volume 003/Juni 2017.
- Hernadi Affandi, Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur, Suatu Tinjauan Akademik, Jurnal Majelis, Edisi 03 tahun 2016.

- Hajriyanto Y Thohari, Penguatan DPD RI : Eksistensifikasi Kewenangan Atau Intensifikasi Kinerja, Jurnal Ketatanegaraan, Volume 003/Juni 201.
- I Wayan Sudirta, Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD 1945, Jurnal Ketatanegaraan, Volume 003/Juni 2017
- Nurudin Hadi, Penataan Kewenangan MPR: Menelusuri Gagasan para Pendiri Negara Tentang Posisi dan Kewenangan MPR, Jurnal majelis, Edisi 03, Tahun 2016
- Lutfi Widagdo Eddyono, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 03 Tahun 2010.
- M Adnan Yazar Zulfikar, Inhibisi Politik : MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, Jurnal Majelis, Edisi 03 Tahun 2016.
- Ria Casmi Arrsa, Sepuluh Isu Pokok Ketatanegaraan Dalam Kerangka Penataan Dan/Atau Penguatan Kelembagaan MPR-RI, Jurnal majelis, Edisi 03 Tahun 2016.

C. ARTIKEL/OPINI

- Indra Piliang, Volksraad Van Indoneisa, Koran Tempo, 24 Juni 2006
- M. Ihsan Loulembah, Bikameral Bukan Federal, Harian Sinar Harapan, 22 Juli 2006.
- M Qodari, “Memveto” Hak Veto DPD?, harian Suara Karya, 9 Juni 2006.
- Ikhwan Mansyur Situmeang, Sejumlah Senator keluhkan Sikap Komisi II DPR Dalam Pembahasan RUU tertentu, Kompasiana, 18 Juni 2012.
- Ikhwan Mansyur Situmeang, DPD Akan Ajukan Judicial Review UU tertentu, Kompasiana, 20 Juni 2012
- Ikhwan Mansyur Situmeang, Putusan MK Ihwat Kewenangan Legislasi DPD Melegakan, Kompasiana, 4 Arpil 2013.
- Ikhwan Mansyur Situmeang, DPR, DPD, dan Presiden Segera Formulasikan Proses Legislasi Tripartit, Kompasiana, 11 April 2013.
- Ikhwan Mansur Situmeang, Kepada MPR DPD Menjelaskan Proses Legislasi Tripartit, Kompasiana, 23 Mei 2013.
- Ikhwan Mansyur Situmeang, Potensi Sengketa Kewenangan Antara DPR dengan DPD, Kompasiana, 23 Juli 2013.
- Ikhwan Mansur Situmeang, Sosialisasi hakdan/atau Kewenangan DPD Pasca Putusan MK, 27 Agustus 2013.
- Ikhwan Mansyur Situmeang, Ketua DPD Menyurati Pimpinan DPR Menyikapi Perkembangan Pembahasan RUU MD3, Kompasiana, 12 Agustus 2014.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD 1945 Naskah Asli dan Perubahannya; Cetakan ke-V; Pustaka Pergaulan; Jakarta 2005.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan DPR-RI Nomor 01/2014 tentang Tata Tertib DPR-RI, Jakarta 2014.
Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

E. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

F. INTERNET

www.mahkamahkonstitusi.go.id DPD Gugat UU MD3 dan UU P3 ke MK, 14 September 2012.

www.hukumonline.com, Akhirnya DPD Gugat UU MD3,15 Agustus 2014.

www.tempo.co.id. DPD Dituding Menginginkan Hak Veto; Kamis, 17 Mei 2007.

www.tempo.co.id. Marzuki: Usul Amandemen UUD Sebaiknya Dihentikan. 30 Agustus 2010.

Rakyat Merdeka Online; DPD Gugat UU MD3 Ke Mahkamah Konstitusi, 8 September 2012.

www.mahkamahkonstitusi.go.id DPD Gugat UU MD3 dan UU P3 ke MK, 14 September 2012.

www.hukumonline.com, Akhirnya DPD Gugat UU MD3,15 Agustus 2014.